

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENANGANAN
KASUS PENAHANAN IJAZAH BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

MAHESA PERKASA

NPM. 22071010046

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENANGANAN
KASUS PENAHANAN IJAZAH BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

MAHESA PERKASA

NPM. 22071010046

Kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
JAWA TIMUR DALAM PENANGANAN KASUS PENAHANAN IJAZAH
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026

Penyusun,



Mahesa Perkasa
NPM. 22071010046

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,




Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI
SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
JAWA TIMUR DALAM PENANGANAN KASUS PENAHANAN IJAZAH
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Penyusun,


Mahesa Perkasa

NPM. 22071010046

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026

Pembimbing:

Dewan Penguji:

Ketua,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003


Waluyo S.H., M.H.


NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota 1,


Eko Wahvudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota 2,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
JAWA TIMUR DALAM PENANGANAN KASUS PENAHANAN IJAZAH
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Penyusun,


Mahesa Perkasa

NPM. 22071010046

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji :

Ketua,



Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003


Waluyo S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota 1;


Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota 2,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,


Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra., Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahesa Perkasa
NPM : 22071010046
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi.

Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,.....Januari 2026

Penyusun



Mahesa Perkasa
NPM. 22071010046

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta karunianya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENANGANAN KASUS PENAHANAN IJAZAH BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK” Skripsi ini penulis buat dengan tujuan pemenuhan persyaratan kelulusan S-1 Prodi Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulisan laporan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait Kewenangan Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Dalam Penanganan Kasus Penahanan Ijazah Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H. selaku Plt. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam mengerjakan Skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
10. Terima Kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Perjalanan menuju titik ini bukanlah jalan yang mudah, terlebih ketika pertama kali memilih jurusan ini, tidak pernah terbayangkan dalam hidup penulis bahwa inilah jalan yang akan dilalui. Namun, kehidupan seringkali membawa kita pada tempat-tempat yang tidak pernah kita rencanakan, dan justru di situlah kita menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Hari ini, dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, penulis berdiri di penghujung perjalanan kuliah yang penuh lika-liku, di mana setiap tantangan

yang dihadapi, setiap malam begadang mengerjakan tugas, setiap keraguan yang sempat muncul, semuanya telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Penulis bangga pada diri sendiri yang tidak menyerah, yang terus berjuang meskipun jalan terasa berat, yang memilih untuk bertahan ketika banyak alasan untuk menyerah. Skripsi ini bukan hanya sekadar kumpulan tulisan akademis, tetapi merupakan bukti nyata dari perjuangan, dedikasi, dan semangat pantang menyerah yang menjadi monumen pribadi penulis, menandai transformasi dari seseorang yang ragu menjadi seseorang yang yakin bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Kepada diri sendiri di masa lalu yang sempat ragu dan takut, terima kasih telah memilih untuk melangkah maju; kepada diri sendiri hari ini, selamat, kamu berhasil; dan kepada diri sendiri di masa depan, semoga perjalanan ini menjadi pengingat bahwa kita selalu lebih kuat dari yang kita kira. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan;

11. Kakek dan Nenek yang telah memberikan tekad yang kuat dan tidak pernah berhenti berjuang, menjalani, serta memaknai dalam kehidupan di dunia ini memberikan support system terhadap penulisan Usulan Penelitian Skripsi ini serta memberikan semangat kepada penulis;

12. Orang tua penulis yang telah membuat memberikan support system terhadap penulisan Usulan Penelitian Skripsi ini serta memberikan semangat kepada penulis;
13. Terima kasih kepada keluarga penulis yang selalu memberi dukungan dan doa dalam menyelesaikan Skripsi ini;
14. Bapak Sigit Priyanto, S.T, M.M. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang sudah menerima untuk melaksanakan kegiatan magang;
15. Bapak Hasan Mangalle, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial serta Pembimbing yang sudah membantu mengarahkan dan memberikan pengalaman dan pelajaran yang cukup banyak yang tidak didapat di bangku perkuliahan;
16. Bapak Ruly Budi Krisbandono, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang senantiasa mau membantu dan membimbing penulis dalam membuat Skripsi ini;
17. Bapak Muhawwin S.H., selaku Staff Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial serta Narasumber yang membantu dalam memperoleh data untuk pengerjaan Skripsi dari Penulis;
18. Bapak Dr. Sugeng Lestari, S.H.,M.H. selaku Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
19. Bapak Alida Bahtiar Jihan, S.IP. , M.Hum. selaku Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah , dan Jaminan Sosial di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;

20. Para Staf Seksi di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas pengalaman dan pelajaran yang cukup banyak yang tidak didapat di bangku perkuliahan;
21. Terima kasih kepada Belgis Syfa Azzahra, selaku teman baik dan selalu mendukung penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini;
22. Terima kasih kepada teman penulis Muhammad Rafly, Bagas Arib Wicaksana yang sudah selalu memberikan motivasi, memberikan semangat, mendengarkan setiap keluhan sehingga penulis masih semangat untuk mengerjakan Skripsi ini;
23. Terima Kasih kepada rekan-rekan organisasi Himpunan Mahasiswa Kuningan Jawa Timur (ARDEWA) yang sudah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam pengerjaan Skripsi ini;
24. Terima Kasih kepada rekan-rekan Komunitas Debat Fakultas Hukum (KDFH) UPN “Veteran” Jawa Timur yang sudah kebersamai dan memberikan motivasi kepada penulis untuk terus semangat untuk mengerjakan Skripsi ini;
25. Terima Kasih kepada Rumah BUMN Surabaya yang sudah kebersamai dan memberikan motivasi kepada penulis untuk terus semangat untuk mengerjakan Skripsi ini;
26. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tetapi akan penulis ingat mengenai kebaikan dan support tersebut kepada penulis saat pengerjaan Skripsi berlangsung.

27. Penulis sangat menyadari dalam Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penulis membuka selebar-lebarnya pintu saran dan kritik agar laporan ini dapat berguna baik bagi penulis, maupun pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, Januari 2026

Mahesa Perkasa

INTISARI

Nama : Mahesa Perkasa
NPM : 22071010046
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 26 Oktober 2003
Program Studi : Starta 1 (S1) Hukum

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENANGANAN KASUS PENAHANAN IJAZAH BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

ABSTARK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam penanganan kasus penahanan ijazah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta merumuskan rekonstruksi norma kewenangan untuk memenuhi prinsip kepastian hukum. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya praktik penahanan ijazah di Jawa Timur dengan 144 kasus tercatat periode Februari-Juli 2025, namun tidak satupun diproses pidana meskipun Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 melarang praktik tersebut dengan sanksi pidana. Studi kasus NSP menunjukkan mediator justru memfasilitasi kesepakatan pembayaran ganti rugi sebagai prasyarat pengembalian ijazah, yang bertentangan dengan larangan mutlak dalam Perda. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan AUPB, menganalisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Disnakertrans, observasi lapangan selama magang Februari-Juni 2025, dan analisis dokumen kasus. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum administrasi negara, dan penelitian terdahulu. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka teori kewenangan pemerintahan, AUPB, dan perlindungan hukum bagi pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bidang HI dan Jamsos telah melanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, dan asas kecermatan dalam AUPB. Dominasi absolut mediasi (100% kasus tidak diproses pidana) menciptakan inkonsistensi antara sanksi pidana dalam Perda dengan praktik penegakan hukum. Ketiadaan SOP tertulis, kriteria objektif disposisi, *legal review* wajib, dan sistem monitoring formal menunjukkan lemahnya penerapan AUPB. Rekonstruksi norma kewenangan yang diusulkan mencakup sepuluh peraturan operasional untuk menjamin kepastian hukum, pemisahan tegas kewenangan mediasi dengan penegakan sanksi, standardisasi prosedur, dan akuntabilitas pelaksanaan.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintahan, Penahanan Ijazah, AUPB, Mediasi Hubungan Industrial, Rekonstruksi Norma

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF THE INDUSTRIAL RELATIONS AND SOCIAL SECURITY DIVISION OF THE EAST JAVA PROVINCE MANPOWER AND TRANSMIGRATION OFFICE IN HANDLING DIPLOMA RETENTION CASES BASED ON THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE

ABSTRACT : This research aims to analyze the authority of the Industrial Relations and Social Security Division of the Manpower and Transmigration Office of East Java Province in handling cases of diploma retention (withholding) based on the General Principles of Good Governance, and to formulate a reconstruction of authority norms to fulfill the principle of legal certainty. The background of this research is the high prevalence of diploma retention practices in East Java, with 144 cases recorded between February and July 2025; however, none were criminally processed despite Regional Regulation Number 8 of 2016 prohibiting such practices with criminal sanctions. The NSP case study revealed that mediators actually facilitated compensation agreements as a prerequisite for the return of diplomas, which contradicts the absolute prohibition stipulated in the Regional Regulation. This research employs an empirical legal method with a Good Governance approach to analyze the discrepancy between *das sollen* and *das sein*. Primary data were obtained through in-depth interviews with officials, field observations during an internship from February to June 2025, and case document analysis. Secondary data consisted of legislation, administrative law literature, and prior research. Data analysis was conducted using a qualitative descriptive method within the theoretical framework of government authority, Good Governance principles, and legal protection for workers. The results indicate that the authority exercised by the Industrial Relations and Social Security Division has violated the principles of legal certainty, impartiality, and carefulness within the General Principles of Good Governance. The absolute dominance of mediation (100% of cases were not criminally processed) creates an inconsistency between the criminal sanctions in the Regional Regulation and actual law enforcement practices. The absence of written Standard Operating Procedures (SOPs), objective disposition criteria, mandatory legal reviews, and formal monitoring systems demonstrates a weak implementation of Good Governance. The proposed reconstruction of authority norms includes ten operational regulations to ensure legal certainty, a strict separation of mediation authority from sanction enforcement, procedural standardization, and implementation accountability..

Keywords: *Government Authority, Diploma Retention, General Principles of Good Governance, Industrial Relations Mediation, Norm Reconstruction.*

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.7 Tinjauan Pustaka	30

BAB II KEWENANGAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENANGANAN SENGKETA PENAHANAN IJAZAH BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).....	47
2.1 Analisis Kewenangan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam Penanganan Kasus Penahanan Ijazah Berdasarkan AUPB	47
2.2 Alur Penanganan Kasus Penahanan Ijazah oleh Bidang HI dan Jamsos Berdasarkan AUPB	74
BAB III REKONSTRUKSI NORMA KEWENANGAN DALAM PENYELESAIAN KASUS PENAHANAN IJAZAH UNTUK MEMENUHI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM	119
BAB IV PENUTUP	141
4.1 Kesimpulan.....	141
4.2 Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian.....	11
Tabel 2 Jadwal Penelitian Skripsi.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)
- Lampiran II. Transkrip Nilai
- Lampiran III. Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran IV. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran V. Halaman Persetujuan Ujian Skripsi
- Lampiran VI. Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran VII. Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- Lampiran VIII. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru
- Lampiran IX. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM/PKL-P
- Lampiran X. Bukti Penyerahan Laporan Proposal Skripsi
- Lampiran XI. Surat Pengantar Penelitian Skripsi
- Lampiran XII. Bukti Wawancara Pejabat Disnakertrans Jatim
- Lampiran XIII. Hasil Uji Turnitin Skripsi
- Lampiran XIV. Hasil Uji Turnitin Jurnal
- Lampiran XV. Surat Uji Plagiasi
- Lampiran XVI. Sertifikat *Library Class*
- Lampiran XVII. *Letter Of Acceptance* Jurnal Sinta 4
- Lampiran XVIII. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran XIX. Link Footnote
- Lampiran XX. Lembar Revisi Ketua Penguji
- Lampiran XXI. Lembar Revisi Anggota I Penguji
- Lampiran XXII. Lembar Revisi Anggota II Penguji

DAFTAR SINGKATAN

AUPB	:	Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Disnakertrans Jatim	:	Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAN	:	Hukum Administrasi Negara
HI dan Jamsos	:	Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
HRD	:	<i>Human Resources Development</i>
KKN	:	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPI	:	<i>Key Performance Indicator</i>
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
Korwil	:	Koordinator Wilayah
Perda	:	Peraturan Daerah
PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
PHI	:	Pengadilan Hubungan Industrial
PPHI	:	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
PTUN	:	Peradilan Tata Usaha Negara
Pergub	:	Peraturan Gubernur
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SIM	:	Sistem Informasi Manajemen
SKP	:	Sasaran Kinerja Pegawai

- SOP : *Standard Operating Procedure* (Prosedur Operasional Standar)
- UU : Undang-Undang
- UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945